



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA HILIRISASI MIGAS: POTENSI DAN TANTANGAN

Dewi Wuryandani

Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kesuksesan hilirisasi di sektor pertambangan mineral membuat pemerintah ingin memperluas aksi yang dapat meningkatkan nilai tambah ke sektor minyak dan gas bumi (migas). Melimpahnya potensi gas bumi menjadi dasar agar komoditas tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal di dalam negeri. Tingginya kebutuhan migas di sektor industri, rumah tangga, dan transportasi semakin melengkapi alasan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor migas.

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM, rencana hilirisasi migas sudah masuk dalam *Roadmap* Hilirisasi Investasi Strategis. Melalui penghiliran, pemerintah ingin memperluas manfaat dari produksi migas nasional agar tidak hanya dinikmati oleh sektor transportasi. Pengembangan lapangan gas bumi misalnya, akan memiliki peran kunci untuk pengembangan industri petrokimia. Di sektor minyak bumi, produksi kilang bahan bakar minyak (BBM) Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Di lain pihak, di sektor gas bumi, Indonesia akan mendapat tambahan pasokan dari proyek-proyek gas bumi dan pasokan potensial. Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2021 sebanyak 64,3% produksi gas bumi Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Total gas bumi yang disalurkan adalah sebesar 5.734,43 *billion british thermal unit per day* (bbtud). Dari jumlah tersebut, sebesar 27,45% untuk sektor industri, 22,18% untuk ekspor LNG, 12,08% untuk industri pupuk, 13,14% untuk ekspor non-migas, dan 11,90% untuk listrik.

Rencana hilirisasi gas bumi untuk kebutuhan pupuk dan petrokimia dari beberapa sumur potensial saat ini terus dikembangkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas. Kementerian ESDM mengidentifikasi setidaknya ada 15 blok gas bumi yang dapat dikembangkan secara terintegrasi pada sisi industri yang lebih hilir. Potensi migas besar misalnya, berada di Laut Andaman dengan proyeksi penyaluran ke pabrik amonia dan urea (pupuk) di Lhokseumawe sebesar 110 *million standard cubic feet per day* (mmscf/d).

Blok migas potensial lainnya berada di Paus, Bulu, Bunga, Agung, dan Mahakam. Beberapa kawasan industri yang direncanakan untuk menerima pasokan gas bumi tersebut berada di Pulau Jawa, mulai dari Kabupaten Batang, Kendal, hingga Gresik. Selain itu, ada juga Indonesia Deepwater Development (IDD) yang gas buminya direncanakan bakal dialihkan untuk kebutuhan industri kimia domestik, amonia-urea, dan soda abu (natrium karbonat) dengan kebutuhan mencapai 500.000 ton per tahun, serta kargo LNG di Bontang pada 2029. Adapun Blok Masela dengan kapasitas produksi mencapai 9,5 *million tons per annum* (mtpa) dan 150 mmscf/d bakal memasok pabrik amonia-urea di Tanimbar. Tidak hanya itu, pemerintah juga turut mempelajari peluang industrialisasi gas bumi dari Blok Warim.

SKK Migas menilai rencana penghiliran gas bumi yang didorong pemerintah akan menciptakan kepastian pasar bagi KKKS di dalam negeri. Kepala SKK Migas menjelaskan, dorongan investasi

lebih lanjut untuk pembangunan pabrik pengguna gas bumi di sisi hilir akan ikut menggairahkan potensi investasi di hulu migas dan mengharapkan kepastian pasar konsumen gas bumi di dalam negeri ikut mendorong minat investasi baru.

Pemerintah perlu memastikan infrastruktur pendukung untuk merealisasikan penghiliran gas bumi yang memadai ke depan. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai biaya paling mahal dalam penghiliran gas bumi nantinya adalah logistik, karena perlu dilakukan pengolahan menjadi CNG ataupun LNG sebelum gas bumi dibawa ke fasilitas penghiliran. Dalam hal ini pemerintah harus membantu karena KKKS tidak mungkin dapat mengembangkan infrastruktur pendukung untuk penghiliran, karena biaya yang sangat tinggi dengan waktu pengembalian investasi relatif lama. Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan penghiliran dan ketahanan energi. Apalagi, belakangan pemerintah juga mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi perantara sebelum beralih sepenuhnya ke energi baru dan energi terbarukan.

Atensi DPR

Sektor hulu migas menjadi motor penting untuk menopang program pemerintah dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan *Gross Domestic Product* (GDP) tertinggi di dunia. Melimpahnya potensi gas bumi menjadi dasar agar komoditas strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal di dalam negeri. Selain itu, tingginya kebutuhan migas di sektor industri, rumah tangga, dan transportasi semakin melengkapi alasan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor migas melalui hilirisasi untuk kepentingan berbagai sektor. Peran DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri, perlu mendorong agar hilirisasi sektor migas tidak hanya pada pembangunan/ pengembangan kilang, tetapi juga hilirisasi gas bumi. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah agar meningkatkan kegiatan eksplorasi migas dari berbagai cekungan yang belum digali, karena pengguna gas bumi di dalam negeri masih cukup banyak khususnya di sektor industri, rumah tangga, dan transportasi.

Sumber

koran tempo.co, 21 September 2023;
kumparan.com, 20 September 2023;
Media Indonesia, 22 September 2023; dan
neraca.com, 23 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023